



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(R E N J A)
TAHUN 2024**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal Kode Pos 36512
Telp. (0742) 21238 E-mail: itkabtjb@gmail.com Website:
<http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi dan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 19 Juli 2024

INSPEKTOR DAERAH,

Drs. ENCEP JARKASIH, CGCAE
Pembina Utama muda
NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	20
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	20
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024	21
.....	
3.3. Rancangan Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
BAB IV PENUTUP	29

-----oOo-----

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Inspektorat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) (RENJA) berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dimaksud sebagai dokumen dan pedoman bagi seluruh personal Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang didasarkan pada RKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2024

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja inspektorat Sampai Dengan Triwulan III
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat kabupatenTanjung Jabung Barat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2024
- 3.3. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2024 Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut ;

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Periode Pelaksanaan : April s/d Juni 2024.

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab				
								I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	73.047.224.045	200	26.779.365.260	100%	14.546.647.075	25	1.186.235.771	25	2.878.749.102					50	4.064.984.873	250	30.844.350.133	42%	42,23%	Inspektorat
2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	600%	89.100.000	200	38.120.000	100%	9.200.000	25	2.850.000	25	1.500.000					50	4.350.000	250	42.470.000	42%	47,67%	Inspektorat

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	30 dokumen	89.100.000	15	38.120.000	5 Laporan	9.200.000	-	2.850.000	1	1.500.000					1	4.350.000	16	42.470.000	69%	47,67%	Inspektora t
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	72 bln	27.124.005.228	12	13.153.368.274	12 bln	5.085.793.975	3	581.755.173	3	1.893.117.404					6	2.474.872.577	18	15.628.240.851	42%	57,62%	Inspektora t
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/tunjangan	72 bulan	25.988.325.228	108	12.628.956.274	39 org	4.890.913.975		554.415.173		1.844.857.404					-	2.399.272.577	108	15.028.228.851	42%	57,83%	Inspektora t
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor pengadministras i keuangan dan Jumlah pengadministras i keuangan	72 doku men	1.135.680.000	36	524.412.000	12 dokumen	194.880.000	3	27.340.000	2	48.260.000					5	75.600.000	17	600.012.000	42%	52,83%	Inspektora t
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek	600%	3.625.370.393	200	1.037.170.100	100%	945.960.000	25	17.210.000	25	393.991.135					50	411.201.135	250	1.448.371.235	42%	39,95%	Inspektora t

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	342 paket	302.200.000	268	97.550.000	116 paket	54.000.000	-	0							26.400.000	268	123.950.000	28%	41,02%	Inspektora t
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang bersertifikasi sesuai dengan Jenjang Jabatannya	342 orang	3.323.170.393	135	939.620.100	134 orang	891.960.000	-	17.210.000	33						367.591.135	168	1.324.421.235	30%	39,85%	Inspektora t
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	23.534.266.124	200%	7.615.604.317	100%	3.044.756.500	25	280.971.563	25						322.439.274	150	8.219.015.154	25%	34,92%	Inspektora t
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	58 paket	99.372.103	24	24.767.597	8 paket	24.619.000	-	0	-						0	24	24.767.597	38%	24,92%	Inspektora t
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	304 paket	1.782.649.833	140	272.335.466	54 paket	514.336.000	-	0	5						74.355.245	145	346.690.711	34%	19,45%	Inspektora t
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum untuk tamu, acara rapat dan kegiatan	17 paket	1.385.900.000	8	127.854.100	3 paket	747.095.000	1	62.565.000	-						26.160.400	9	216.579.500	147%	15,63%	Inspektora t

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	78 paket	1.035.124.088	39	74.573.200	13 paket	494.851.000	4	6.850.000	1	2.398.500					5	9.248.500	44	83.821.700	38%	8,10%	Inspektora t
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	13 dokum en	103.800.000	4	19.920.000	3 dokumen	24.600.000	-	180.000	-	1.510.000					-	1.690.000	4	21.610.000	23%	20,82%	Inspektora t
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di luar daerah	72 laporan	19.126.420.100	36	7.096.153.954	12 laporan	1.239.255.500	3	211.376.563	3	218.015.129					6	429.391.692	42	7.525.545.646	42%	39,35%	Inspektora t
		Pengadaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	12.509.944.100	200	3.625.926.000	100%	4.041.122.800	10	240.500.000	10	110.836.500					20	351.336.500	220	3.977.262.500	37%	31,79%	Inspektor at
		Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Emoat dan Roda Dua	24 unit	2.631.000.000	9	1.643.860.000	7 unit	1.160.040.000	-	0		0			-		-	0	9	1.643.860.000	29%	62,48%	Inspektora t
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pembelian Peralatan Gedung Kantor	216 unit	8.678.944.100	114	1.982.066.000	36 unit	605.322.800	14	240.500.000	1	3.000.000					15	243.500.000	129	2.225.566.000	79%	25,64%	Inspektora t

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (penambahan gedung baru)	4 paket	2.000.000.000	0	0	2 Unit	2.275.760.000	-	0						-	107.836.500	-	107.836.500	0%	5,39%	Inspektora t
		Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	2.339.368.500	200	549.920.888	100%	659.792.000	-	54.449.035	25	58.626.286				25	113.075.321	225	662.996.209	18%	28,34%	Inspektor at
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan dan tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis web	72 laporan	49.500.000	36	8.380.000	12 laporan	13.000.000	3	250.000	2	980.000				5	41	9.610.000	1.230.000	42%	19,41%	Inspektora t
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air	72 laporan	819.118.500	36	216.600.888	12 laporan	373.792.000	3	19.899.035	3	12.946.286				6	42	249.446.209	32.845.321	42%	30,45%	Inspektora t
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72 laporan	1.470.750.000	36	324.940.000	12 laporan	273.000.000	3	34.300.000	3	44.700.000				6	42	454.500.000	129.560.000	42%	30,90%	Inspektora t
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	600%	3.813.169.700	200	759.255.681	100%	760.021.800	4	8.500.000	25	98.238.503				29	229	865.994.184	106.738.503	38%	22,71%	Inspektor at

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	162 unit	1.230.181.050	70	412.691.709	26 unit	255.488.800	1	-	4.500.000	72.842.000					1	77.342.000	71	490.033.709	33%	39,83%	Inspektora t
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		31 unit	1.417.264.100	12	152.824.830	3 unit	357.003.000	-	-	4.000.000	17.406.503					-	21.406.503	12	174.231.333	42%	12,29%	Inspektora t
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	313 unit	945.964.550	124	104.281.982	63 unit	147.530.000	-		0	7.990.000					-	7.990.000	124	112.271.982	62%	11,87%	Inspektora t
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jumlah petugas penjaga kantor	1 unit	219.760.000	1	89.457.160	1 unit	0	-		0						-	0	1	89.457.160	100%	40,71%	Inspektora t

01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	85%	7.295.932.152	150	814.903.056	78%	2.875.686.800	32	39.875.000	14	212.730.000				46	252.605.000	196	1.067.508.056	231%	14,63%	Inspektoral
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1158 LHP	4.829.845.750	579	443.591.500	193 LHP	2.640.954.300	32	31.875.000		199.230.000				32	231.105.000	611	674.696.500	41%	13,97%	Inspektoral
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja pemerintah Daerah	186 laporan	621.475.000	93	72.962.000	44 lap	142.600.000	31	6.300.000	13	9.000.000				44	11.235.000	137	84.197.000	50%	13,55%	Inspektoral
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	224 laporan	1.226.475.000	132		56 laporan	724.076.000	-	0		10.440.000				-	5.145.000	132	5.145.000	67%	0,42%	Inspektoral
		Reviu Laporan Kinerja	umlah laporan Hasil Reviu Laporan kinerja	224 laporan	996.300.000	132	14.849.000	1 laporan	313.800.000	-	0	-	17.525.000				-	17.525.000	132	32.374.000	49%	3,25%	Inspektoral

		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	6 laporan	741.925.000	3	33.700.000	1 laporan	491.768.850	1	5.575.000	-	134.265.000						1	139.840.000	4	173.540.000	50%	23,39%	Inspektora t
		Pengawasan Desa	jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	390 laporan	549.288.750	195	27.860.000	65 laporan	726.822.000	-	2.000.000	-	3.000.000						-	10.460.000	195	38.320.000	33%	6,98%	Inspektora t
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	694.400.000	24	294.220.500	8 dokumen	241.887.450	-	18.000.000	2	25.000.000						2	77.320.000	26	371.540.500	42%	53,51%	Inspektora t
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	600%	2.466.086.402	200%	371.311.556	100%	234.732.500	-	8.000.000	25	13.500.000						25	21.500.000	102	392.811.556	17%	15,93%	Inspektora t
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	48 laporan	541.566.250	24	158.425.000	8 laporan	79.732.500	-	8.000.000	2	12.000.000						2	39.950.000	26	198.375.000	42%	36,63%	Inspektora t
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	120 laporan	1.924.520.152	60	212.886.556	10 laporan	155.000.000	-	0	4	1.500.000						4	68.750.000	64	281.636.556	42%	14,63%	Inspektora t

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil	600%	4.549.223.659	148%	1.145.430.468	100%	375.290.000	21	10.000.000	25	17.000.000					46	27.000.000	194	1.172.430.468	32%	25,77%	Inspektoral
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	600%	428.275.000	165%	86.935.000	100%	36.000.000	21	4.000.000	15	6.000.000					36	10.000.000	201	96.935.000	34%	22,63%	Inspektoral
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Yang Disusun	3030 rekomen dasi	428.275.000	1515	86.935.000	505 rekomen dasi	36.000.000	-	4.000.000		6.000.000					-	10.000.000	1.515	96.935.000	50%	22,63%	Inspektoral
2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi	600%	4.120.948.659	200%	1.058.495.468	100%	339.290.000	-	6.000.000	10	11.000.000					10	17.000.000	210	1.075.495.468	35%	26,10%	Inspektoral
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	108 kegiatan	2.626.610.461	51	847.225.600	17 kegiatan	249.600.000	-	6.000.000	6	11.000.000					6	17.000.000	57	864.225.600	52%	32,90%	Inspektoral

		Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	53 perang kat Daerah	1.494.338.198	24	211.269.868	10 perangka t daerah	89.690.000	-	0	0					-	0	24	211.269.868	45%	14,14%	Inspektora t
				1285%	84.892.379.856	351	28.739.698.784	2,78	17.797.623.875	78,00	1.236.110.771	3.108.479.102 64,00					142	4.344.589.873	493	33.084.288.657	384 0%	38,97 %	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	47						
Predikat kinerja																	Sang at Rend ah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Apabila terpenuhi SDM yang dibutuhkan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM yang ada																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																							

Dari Pagu anggaran murni Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebesar Rp17.797623.875,- dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp4.344.589.873,- atau capaian realisasi sebesar 24,41%, dari seluruh program dan kegiatan Inspektorat. Dari hasil evaluasi renja sampai di bulan Juni 2024 tingkat pencapaian belum sesuai dengan target Triwulan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan-kegiatan. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA yang mengacu terhadap RPJMD tahun 2021-2026.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

- a. Faktor Pendorong :
 1. Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
 2. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
 3. Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
 4. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

1. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek yang diperiksa.
2. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih harus berbenah untuk meningkatkan nilai yang lebih baik.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
4. Maturitas Kapabilitas APIP di Tahun 2022 harus sudah mendapat level 3 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *quality assurance* bagi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan tersebut memuat penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu rencana.

Adapun tujuan dan sasaran yang sudah tertuang dalam Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan Pemerintah Daerah.
- Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien, dan akuntabel.

b. Sasaran

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan.
- Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rancangan Perubahan rencana kerja (RENJA).

3.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Inspektorat yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis yang mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Untuk besaran Anggaran pada Program dan kegiatan yang ada pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Perubahan Renja tahun 2024 sebesar pagu Rp. 21.589.888.561,- Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Table
Rumusan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN ANGGARAN					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	RENJA 2024 SEBELUM PERUBAHAN	Pagu Murni Anggaran Tahun 2024	Pagu Pergeseran Tahun 2024 sebelum penambahan Pagu Perubahan	Berkurang/ Bertambah	Pagu setelah Penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2024	Berkurang/ Bertambah
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	2	3	4	5	6	7	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 4
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	12.490.158.138	14.546.647.075	14.906.709.475	360.062.400	18.569.474.211	3.662.764.736
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Inspektorat	100%	100%	16.550.000	9.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	5 Laporan	5 Laporan	16.550.000	9.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Inspektorat	12 Bulan	12 Bulan	4.644.985.638	5.085.793.975	5.085.793.975	0	5.448.098.661	362.304.686
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	39 org	39 org	4.450.945.638	4.890.913.975	4.890.913.975	0	5.218.178.661	327.264.686
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	12 Dokumen	12 Dokumen	194.040.000	194.880.000	194.880.000	0	229.920.000	35.040.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Inspektorat	100%	100%	789.500.000	945.960.000	1.258.860.000	312.900.000	1.664.685.000	405.825.000

1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Inspektorat	116 Paket	116 Paket	69.500.000	54.000.000	54.000.000	0	186.600.000	132.600.000
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	134 Org	149 Org	720.000.000	891.960.000	1.204.860.000	312.900.000	1.478.085.000	273.225.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat	100%	100%	4.229.733.300	3.044.756.500	2.528.193.300	- 516.563.200	4.964.729.600	2.436.536.300
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	8Paket	8Paket	24.619.000	24.619.000	24.619.000	0	24.619.000	0
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	54 Paket	54 Paket	499.966.000,00	514.336.000	314.670.000	- 199.666.000	312.470.000	-2.200.000
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat	3 Paket	3 Paket	400.000.000	747.095.000	747.095.000	0	792.375.000	45.280.000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	13 Paket	13 Paket	280.198.800	494.851.000	294.997.800	- 199.853.200	318.188.600	23.190.800
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	24.600.000	24.600.000	0	24.600.000	0
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	12 Laporan	12 Laporan	2.999.949.500	1.239.255.500	1.122.211.500	- 117.044.000	3.492.477.000	2.370.265.500
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Inspektorat	100%	100%	1.659.239.800	4.041.122.800	4.561.562.800	520.440.000	4.948.996.800	387.434.000
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat	7 Unit	7 Unit	933.832.000	1.160.040.000	1.160.040.000	0	1.160.040.000	0

1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	36 Unit	36 Unit	325.407.800	605.322.800	605.322.800	0	992.756.800	387.434.000
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	2 Unit	2 Unit	400.000.000	2.275.760.000	2.796.200.000	520.440.000	2.796.200.000	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat	100%	100%	536.030.000	659.792.000	666.992.000	7.200.000	666.992.000	0
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	12 Lap	12 Lap	12.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	12 Laporan	12 Laporan	174.050.000	373.792.000	380.992.000	7.200.000	380.992.000	0
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12 Laporan	12 Laporan	349.980.000	273.000.000	273.000.000	0	273.000.000	0
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat	100%	100%	614.119.400	760.021.800	796.107.400	36.085.600	866.772.150	70.664.750
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	26 Unit	26 Unit	222.238.800	255.488.800	283.644.400	28.155.600	317.644.400	34.000.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat	3 Unit	3 Unit	206.940.600	357.003.000	357.003.000	0	385.737.750	28.734.750
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat	63 Unit	63 Unit	184.940.000	147.530.000	155.460.000	7.930.000	163.390.000	7.930.000

1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Inspektorat	-	-				0		0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			80%	80%	1.471.064.400	2.875.686.800	2.515.624.350	- 360.062.450	2.515.624.350	0
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Inspektorat	193 LHP	193 LHP	1.227.592.800	2.640.954.300	2.280.891.850	- 360.062.450	2.280.891.850	0
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	44 Lap	44 Lap	181.720.000	142.600.000	142.600.000	0	142.600.000	0
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	56 Lap	56 Lap	380.624.800	724.076.000	724.076.000	0	724.076.000	0
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	1 Lap	1 Lap	178.160.000	313.800.000	253.800.000	-60.000.000	253.800.000	0
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	1 Lap	1 Lap	191.808.000	491.768.850	391.726.600	- 100.042.250	391.726.600	0
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat	65 Lap	65 Lap	159.780.000	726.822.000	526.801.800	- 200.020.200	526.801.800	0
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	8 Dokumen	8 Dokumen	135.500.000	241.887.450	241.887.450	0	241.887.450	0
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Inspektorat	100%	100%	243.471.600	234.732.500	234.732.500	0	234.732.500	0
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Inspektorat	8 Lap	8 Lap	117.151.600	79.732.500	79.732.500	0	79.732.500	0
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	10 Lap	10 Lap	126.320.000	155.000.000	155.000.000	0	155.000.000	0

3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			100%	100%	632.295.000	375.290.000	375.290.000	0	504.790.000	129.500.000
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Inspektorat	100%	100%	65.650.000	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	505 Rekomendasi	505 Rekomendasi	65.650.000	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
3.2	Pendampingan dan Asistensi		Inspektorat	100%	100%	566.645.000	339.290.000	339.290.000	0	468.790.000	129.500.000
3.2.1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	17 Kegiatan	17 Kegiatan	327.510.000	249.600.000	249.600.000	0	379.100.000	129.500.000
3.2.2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	239.135.000	89.690.000	89.690.000	0	89.690.000	0
						12.490.158.138	14.546.647.075	14.906.709.475	360.062.400	18.569.474.211	3.662.764.736
						14.593.517.538	17.797.623.875	17.797.623.825	-50	21.589.888.561	3.792.264.736

3.3. RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

IV Penutup

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran Tahun 2024 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur dan terlaksana sesuai tujuan.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan RKPD Provinsi Jambi yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Kuala Tungkal, Juli 2024

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT' at the top and 'INSPEKTORAT DAERAH' at the bottom, separated by stars. The center of the stamp has the text 'INSPEKTUR DAERAH,' above a signature and 'Drs. ENCEH LARKASIH, CGCAE' below it. Underneath the name is the title 'Pembina Utama Muda' and the NIP number 'NIP. 19701201 199009 1 001'.

INSPEKTUR DAERAH,
Drs. ENCEH LARKASIH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001